



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 3 No. 1 Tahun 2020

Doi : 10.21043./politea.v3i1.7086

http : //journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

---

## **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menjawab Tantangan Multikultural di Indonesia : Studi Kasus Papua**

**Nevy Rusmarina Dewi, Ahmad Sholahuddin**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus*

*Nevyrusmarina@iainkudus.ac.id, sholahuddinjepara99@gmail.com*

### **Abstract**

Partai kebangkitan Bangsa (PKB) is one of the Islamic parties which has a fairly large mass in Indonesia. Its existence in Indonesia is very important to unite the multicultural nation of Indonesia. During Gus Dur's leadership, PKB opened many discourses on the issue of multiculturalism so that many people made PKB a role model in multicultural life. The method used in this study is a qualitative research method using literature study sources in the form of books, websites, articles and newspapers. One case that shows the attitude of PKB is multicultural is the Papua Conflict case. Recent cases have become very important issues for the sustainability of politics and governance in Indonesia. PKB gave a statement in overcoming this conflict, that the Indonesian government immediately resolve the issue. Multicultural open policy has become part of PKB in the political arena in Indonesia. In this article, we will discuss how PKB attitudes in political life in Indonesia, especially regarding attitudes in conflict in Papua..

Keyword: PKB, Papua conflict, multicultural

### **Abstrak**

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu partai Islam yang memiliki massa cukup besar di Indonesia. Keberadaannya di Indonesia sangat penting untuk menyatukan multikultural bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan Gus Dur, PKB membuka banyak wacana tentang isu multikulturalisme sehingga banyak orang menjadikan PKB sebagai panutan dalam kehidupan multikultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber studi literatur baik berupa buku, website, atikel maupun surat kabar. Satu kasus yang menunjukkan sikap PKB bersifat multikultural adalah kasus Konflik Papua. Kasus yang terjadi belakangan ini telah menjadi isu yang sangat penting bagi keberlanjutan politik dan pemerintahan di Indonesia. PKB memberikan pernyataan dalam mengatasi konflik ini, bahwa pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah tersebut. Kebijakan terbuka multikultural telah menjadi bagian dari PKB di arena politik di Indonesia. Pada artikel ini, kita akan membahas bagaimana sikap PKB dalam kehidupan politik di Indonesia, terutama mengenai sikap dalam konflik di Papua.

Kata kunci: PKB, konflik Papua, multikultural

## Pendahuluan

Partai Politik sangat penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia karena punya peran strategis baik dalam penguatan kultural di masyarakat namun juga secara struktural pada pelaksanaan seleksi kepemimpinan nasional. Partai politik memiliki posisi sebagai aspirator bagi masyarakat dengan Negara sehingga kedudukan dan peranannya sangat penting dalam kehidupan politik, terutama dalam konteks *nation state* di Indonesia. Proses penguatan *nation state* sangat membutuhkan peran serta dari partai politik karena Indonesia merupakan negara yang multikultural sehingga dibutuhkan toleransi dalam masyarakat majemuk secara etnis, suku, agama, dan golongan.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, peran umat Islam dalam memajukan demokrasi di Indonesia sangat besar. Berbeda dengan praktik di negara-negara lain, masyarakat Muslim Indonesia tidak mengedepankan basis agama Islam sebagai identitas partai politik. Mereka justru banyak berperan di partai-partai politik yang berbasis nasional. Terbukti dalam sejumlah Pemilu yang diselenggarakan Indonesia, baik untuk anggota parlemen, Kepala Daerah, maupun Presiden, partai-partai pemenang terbesar adalah partai yang berbasis nasional. Di partai-partai tersebut masyarakat muslim Indonesia memiliki pengaruh besar namun tetap mengedepankan prinsip Pancasila yang mengakomodir aspirasi seluruh bangsa termasuk dari kelompok-kelompok non Muslim.

Sejak pemilu pertama tahun 1955, partai politik yang berperan serta berasal dari berbagai agama maupun golongan. Partai politik Islam pun bermunculan sejak saat itu, seperti: Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI, dan AKUI. Kemunculan partai Islam bertujuan sebagai sarana aspirasi masyarakat Islam, walaupun hasilnya kurang maksimal merepresentasikan mayoritas umat Islam di Indonesia pada saat itu (Utaria, 2008, p. 33). Semenjak Pemilu tahun 1971 pada masa orde baru terjadi fusi dari banyak partai mengerucut menjadi tiga partai. Empat partai Islam yang ada saat itu, Permusi, PSII, Nahdatul Ulama, dan Partai Islam menjadi satu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan partai berideologi nasional serta partai dari agama selain Islam menjadi satu dalam Partai Demokrasi Indonesia. Hal ini berlangsung sampai berakhirnya era orde baru.

Pasca reformasi di Indonesia, pelaksanaan demokrasi berkembang sangat pesat. Selama orde baru hanya tiga partai saja yang diperbolehkan yaitu: PPP, Golkar, dan PDI, namun setelah reformasi PPP sebagai basis partai politik Islam kemudian terpecah menjadi beberapa partai Islam. Semenjak Pemilu 1999, partai politik Islam telah menjadi bagian dari kehidupan politik di Indonesia yaitu melalui keikutsertaan dalam Pemilu yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Muncul partai politik Islam yang berjumlah 20 mengikuti Pemilu 1999 dari 48 Partai Politik yang ada. Semenjak itu, pemilu selalui diwarnai partisipasi parpol Islam. Mulai Pemilu 2004 jumlahnya telah stabil antara lain yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan & Sejahtera (PKS), serta Partai Bulan Bintang (PBB). Sampai pemilu 2019, ke enam parpol Islam tersebut masih mewarnai kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.

Tabel perbandingan peserta pemilu dengan parpol Islam peserta Pemilu (Kompas.com, 2018)

Pemilu	Jumlah peserta	Partai islam
1999	48	20
2004	24	7
2009	38	6
2014	12	5
2019	16	5

## Pembahasan

### *Masyarakat Multikultural*

Masyarakat Multikultural secara umum diartikan sebagai masyarakat yang berada dalam kondisi saling menerima atas realitas kondisi keragaman baik suku, agama, ras, dan budaya yang sama hak dan derajatnya. Menurut Lawrence Blum, Multikultural merupakan keyakinan yang dimiliki yang berbentuk ideologi dalam hal penerimaan perbedaan baik agama, etnis, politik, maupun perbedaan lainnya baik dilakukan secara individu mau pun dilakukan dalam kelompok.

Sebagai Negara multikultural dengan ribuan suku yang dimiliki, bermacam agama, ras, serta antargolongan membuat Indonesia memiliki potensi muncul konflik yang sangat besar. Tantangan konflik multikultural di Indonesia bisa muncul dalam setiap aspek perbedaan dalam memandang kehidupan. Potensi menimbulkan konflik, bisa berasal dari perbedaan suku, agama, maupun ras, ataupun antar golongan. Peristiwa 1998 merupakan salah satu contoh dari konflik yang muncul dimana faktor ras menjadi pemicu utama dalam peristiwa tersebut. Begitu juga dengan konflik agama Islam dengan agama Kristen di Ambon tahun 1999 yang mengakibatkan porak porandanya kota Ambon dan menyebabkan warga muslim mengungsi. Konflik yang lain contohnya adalah konflik di Aceh, dengan penyebab Gerakan Aceh Merdeka yang ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Belakangan ini, konflik yang mencuat sebagian dikarenakan karena perbedaan pandangan mengenai agama. Kasus penistaan agama oleh Ahok pada Pilkada 2017 di Jakarta merupakan salah satu contoh, kemudian semakin meruncingnya perbedaan pandangan antar kelompok Islam yang kemudian menjuluki kelompok umat dan non umat pada Pemilu 2019. Menurut Amin Abdullah, Perbedaan pandangan masyarakat Indonesia mengenai agama dikarenakan perbedaan penafsiran terhadap kitab suci, sedangkan pada pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat tidak ada tafsir tunggal yang dijadikan pedoman (Yaqin, 2005, p. xiv).

Perbedaan bisa terjadi karena banyak faktor seperti budaya, ekonomi, politik, pendidikan, atau tingkat peradaban. Interpretasi yang berbeda menimbulkan konflik ketika merasa pihaknya lah yang paling benar dalam penafsiran sedangkan pihak lain adalah salah, sehingga memunculkan stempel bid'ah, kafir, serta murtad. Menurut Abu Ishaq asy Syatibi bahwa akar akar terjadinya bid'ah serta perpecahan umat dikarenakan kesombongan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki

oleh sekelompok masyarakat yang akhirnya membawa ke perpecahan serta perselisihan (Syihab, 1997, p. 256). Hal ini kemudian akan memunculkan klaim kelompok yang merasa beragama paling benar, hal ini dikarenakan adanya kelompok yang keyakinannya dikategorikan radikal terhadap teks agama (Sumbullah, 2010, p. 13). Selanjutnya kelompok-kelompok tersebut akan menjadikan penilaian hanya ada dua sisi saja, yaitu baik buruk, benar salah, Islam kafir, surga neraka. Hal ini tidak sesuai dengan budaya multikultural yang ada di Indonesia saat ini.

Pada 14<sup>th</sup> *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* tahun 2014, dibahas mengenai tantangan multikultural. Sejak zaman Rasulullah konflik multikultural telah terjadi dan pada masa tersebut disepakati perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Perjanjian tersebut berisi 47 pasal dimana 23 pasal membahas mengenai hubungan umat Islam antara kaum anshar dan muhajirin sedangkan 24 pasal yang lain membicarakan tentang umat Islam dengan umat lainnya. Menurut Abdullah A'la, Rektor UIN Sunan Ampel Negara Indonesia bisa mengadopsi nilai-nilai yang ada pada Piagam Madinah untuk dilaksanakan di Indonesia dalam mengatasi potensi konflik multikultural yang timbul bisa melalui organisasi NU dan Muhammadiyah ("Menjawab Tantangan Multikulturalisme di Indonesia," 2014).

Menurut Ramlan Surbakti, partai politik berperan sebagai komunikator politik yang bertugas untuk menyampaikan informasi dari masyarakat kepada pemerintah ataupun sebaliknya dari pemerintah pada masyarakat dengan mengolah informasi dengan baik sehingga penerima informasi dapat memahami (Surbakti, 1992, p. 120). Partai politik punya andil yang sangat besar sebagai sarana komunikasi baik dari pemerintah maupun masyarakat sehingga punya peran yang besar dalam kehidupan politik di Indonesia. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang cultural ini partai politik berada di garda terdepan dalam menjaga budaya multikultural di Indonesia.

Partai politik punya tanggung jawab dalam menumbuhkan nasionalisme masyarakat Indonesia pada budaya demokrasi di Indonesia. Partai politik Islam khususnya, harus berperan serta dalam penguatan toleransi sebagai kunci untuk menjaga multikultural yang ada di Indonesia. Potensi konflik yang bersumber agama sangat besar potensinya, terutama di negara Indonesia, sehingga agama Islam memosisikan diri sebagai mediasi untuk meredam potensi konflik yang begitu sangat tinggi (Azizah & Azhar, 2015, p. 81). Partai Islam memiliki kewajiban untuk menjaga toleransi di tengah masyarakat yang multicultural sehingga bisa melawan radikalisme dan intoleransi yang berkembang di Indonesia. Dalam hubungan antara negara dengan agama, agama berada pada posisi yang penting dalam pembentukan etika moral dalam kehidupan bernegara bertujuan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika-moral. Partai Islam sebagai basis bagi penguatan masyarakat yang majemuk sehingga dalam masyarakat yang multicultural ini partai Islam berperan penting bagi toleransi keberagaman bagi penguatan nasionalisme.

### *PKB dan Tantangan dalam Multikultural*

Berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto menjadi titik balik demokrasi di Indonesia yaitu dengan munculnya berbagai Partai Politik yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berdirinya PKB karena adanya usulan dari warga nahdliyin pada organisasi Nahdlatul Ulama untuk mendirikan partai politik yang bisa menampung aspirasi kaum nahdliyin.

Akhirnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdiri pada tanggal 23 Juli tahun 1998, sebagai aspirasi dari warga Nahdatul Ulama. PKB didirikan dengan landasan yang bersifat kejuangan, terbuka, kebangsaan dan demokratis. Sejak awal berdiri, PKB mengusung nilai demokratis dan menjunjung tinggi nasionalisme serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengurus Besar NU menetapkan bahwa NU bukanlah partai politik dan tidak akan mendirikan partai politik, tetap dipertahankan sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiah (Mayrudin & Akbar, 2019, p. 174). Namun demikian, PB NU tidak melarang warga Nahdhiyin jika akan mendirikan partai politik. PKB tidak hanya menjadi wadah aspirasi bagi nahdliyin tapi juga terbuka bagi masyarakat Indonesia secara umum. Deklarasi pembentukan PKB dilakukan di kediaman Ketua PB NU Gus Dur, pada saat itu Matori Abdul Jalil terpilih menjadi ketua umum PKB pertama.

PKB menjunjung tinggi multikultural di Indonesia, oleh karena itu partai ini berpijak pada Pancasila dalam setiap usahanya. Pancasila dilaksanakan dengan seiring dengan dijiwai sikap mengembangkan hubungan persaudaraan, yaitu ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyah*), ikatan kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*), serta ikatan kemanusiaan (*ukhuwah insanyah*). PKB juga bercirikan humanisme religious (*insaniyah diniyah*) peduli dengan nilai kemanusiaan yang agamis, wawasan kebangsaan. Corak perjuangannya santun dan akhlakul karimah dengan melestarikan tradisi yang baik serta mempelajari tradisi baru yang yang baik pula. PKB merupakan partai yang terbuka bagi seluruh suku, agama, ras, dan antar golongan yang dituangkan dalam manifestasi berupa visi, misi, bentuk perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.

PKB mempromosikan islam nusantara sebagai solusi dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi di Indonesia serta banyak tragedi kemanusiaan yang terjadi atas nama agama. PKB menyatakan sikap mendukung penuh multikulturalisme di Indonesia, hal ini sesuai dengan hasil Muktamar V PKB di Bali 20-21 Agustus 2019, yang menghasilkan "Deklarasi Bali" mengenai Sembilan sikap PKB ("Muktamar PKB Hasilkan Deklarasi Bali Dukung Islam Nusantara," 2019), yaitu: 1) PKB mengawal dan memperkokoh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 dalam komitmen berbangsa dan bernegara dalam hal ini PKB ikut mengawal agar tidak ada lagi ideologi yang ingin merubah Pancasila di Indonesia. 2) mendorong dan mempromoskan islam nusantara dalam kehidupan sebagai solusi konflik dan tragedi kemanusiaan atas nama agama. 3) Para wakil potitiknya Mengabdikan dan totalitas bekerja untuk melayani serta memfasilitasi dan membela yang lemah. 4) Akan menuntaskan kaderisasi politik di semua laisan masyarakat untuk memastikan terjadinya estafet dan regenerasi kepemimpinan politik. 5) akan melanjutkan dan akan mempekuat khidmat kepada warga NU khususnya dibidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, ekonomi mikro kecil dan menengah serta agama dan keberagaman. 6) mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan menggerakkan inovasi di kalangan kaum muda generasi milenial. 7) mengembangkan demokrasi inklusif, dimana PKB mentransformasikan demokrasi inklusif dimana semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. 8) penegakan kedaulatan desa dengan cara mengawal dan memperkua desa sebagai pilar kebudayaan bangsa dan perekonomian nasional. 9) politik hijau, meneguhkan PKB dengan mempromosikan politik yang berperspektif lingkungan sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.

Visi yang dimiliki PKB antara lain ("Visi Misi PKB," n.d.): 1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; 3) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul

karimah. Dari visi dapat dilihat bahwa parpol ini memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI. Walaupun parpol Islam, namun ingin membangun masyarakat adil makmur baik materiil maupun spiritual dimana tidak mengkhususkan umat muslim namun seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia.

Sedangkan misi PKB (“Visi Misi PKB,” n.d.), yaitu: 1) Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis; 2) Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial; 3) Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa; 4) Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan; 5) Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

### *Penanganan Kasus Papua Era Gus Dur*

Presiden Abdurrahman Wahid salah satu presiden yang memiliki banyak inisiatif dalam berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Dua bulan sejak pelantikannya sebagai presiden, Gus Dur langsung member perhatian pada daerah Irian Jaya dengan tujuan untuk melakukan dialog dengan berbagai macam elemen di Papua serta untuk melihat matahari terbit pada tahun milenium yaitu 1 Januari tahun 2000. Para perwakilan masyarakat Irian Jaya saat itu banyak yang mengutarakan kekecewaan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah RI. Solusi yang diberikan oleh Gus Dur adalah dengan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Irian Jaya dikembalikan menjadi nama Papua pada 30 Desember 1999 oleh Gus Dur yang menjabat presiden Indonesia keempat saat itu. Acara tersebut digelar di Jayapura dengan mengundang perwakilan elemen masyarakat Papua.

Pada 6 Oktober 2000 telah terjadi Tragedi Wamena dimana terjadi kekerasan terstruktur yang terjadi akibat pengibaran bendera bintang kejora (identitas simbolis Negara Melanesia) yg dianggap sebagai bentuk perjuangan Papua merdeka. Kekerasan ini dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para pihak pengibar bendera. Dampak yang terjadi selanjutnya adalah konflik horizontal antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang. Presiden Gus Dur menyetujui bendera bintang kejora sebagai identitas budaya masyarakat asli Papua, bahkan pengibarannya diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai separatism dengan ketentuan dikibarkan berdekatan dengan bendera merah putih. Gus Dur, mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua selama pemerintahannya dengan peraturan dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih dan dengan lokasi yang telah didaftarkan. Menurut masyarakat adat Papua makna dari Bintang kejora merupakan lambing dari symbol Tuhan pencipta langit dan bumi yang diyakini sebagai tuhan oleh orang Biak. Gus Dur memberikan izin atas kegiatan kongres rakyat papua, sedangkan di

pihak lain kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan separatis. Gus Dur berjanji akan membantu penyelenggaraan acara kongres tersebut dengan memberikan bantuan dana.

Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) , beliau mengeluarkan ketetapan MPRS No. IV/MPR/2000 yang berisi mengenai rekomendasi peraturan otonomi Khusus (Otsus) bagi daerah Papua dan Aceh dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Ketetapan tersebut kemudian ditegaskan dengan mengesahkan UU No. 21/2001 mengenai otonomi khusus untuk Papua, hal ini dilakukan setelah Gus Dur mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. Tujuan pengesahan UU tersebut agar dapat dilaksanakan peningkatan berbagai layanan umum di Propinsi Papua, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan serta pendayagunaan penduduk. Harapannya penduduk Papua, khususnya masyarakat asli Papua bisa segera merasakan hasil pembangunan, perlindungan terhadap hak-hak mereka serta agar terjadi kesetaraan harkat dan martabat antara masyarakat Papua asli dengan penduduk pendatang ataupun penduduk Indonesia pada umumnya. Kebijakan tersebut bermaksud agar standar kehidupan masyarakat di Papua meningkat dengan adanya pembangunan yang mendengarkan aspirasi masyarakat setempat, sehingga jurang perbedaan dengan propinsi lainnya menjadi semakin kecil.

Otsus merupakan kebijakan politik yang diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur untuk menanggulangi konflik. Kebijakan ini merupakan rekomendasi oleh MPR khusus untuk Papua dengan penawaran politik tertentu, yang di dalamnya terdapat elemen-elemen khusus (Sugandi, 2008, p. 7), antara lain yaitu: 1) penghormatan hak asasi manusia, nilai agama, demokrasi, hukum, dan budaya dalam masyarakat adat. 2) menghormati keanekaragaman kehidupan sosial dan budaya masyarakat Papua. 3) perlindungan dan penghormatan terhadap etika dan moral. 4) perlindungan terhadap hak fundamental serta hak asasi manusia dari penduduk 5) kepastian penegakan hukum 6) penegakan demokrasi. 7) menghormati pluralisme. 8) pemecahan masalah hak asasi manusia terhadap penduduk asli Papua yang hak-haknya telah dilanggar. Pasca pengesahan Otsus, terjadi perpecahan di masyarakat Papua antara yang pro dan kontra, hal ini diperparah adanya ketakutan bahwa dana Otsus akan diselewengkan sebagai dana bagi kaum separate. Hal ini mengakibatkan terpecahnya masyarakat Papua yang terdiri dari banyak suku menjadi dua bagian yaitu yang pro Otsus dengan yang pro kemerdekaan.

Menurut UU No. 21/2001 Pasal 2 Paragraf 5 menyatakan bahwa “ dalam rangka melaksanakan Otsus di Papua dibentuklah perwakilan budaya masyarakat Papua yang disebut MRP ( Majelis Rakyat Papua) yang punya kewenangan untuk melindungi hak-hak masyarakat asli Papua. Hak-hak tersebut meliputi pendayagunaan perempuan, penghormatan adat budaya, serta memperkuat keharmonisan antar agama. MRP bergerak sebagai bagian ujung tombak penegakan Otsus di Papua. Perannya sangat penting dalam mengaplikasikan tujuan dari Otsus, terutama dalam memfasilitasi bagi kaum perempuan agar berdaya serta menyetarakan kedudukan masyarakat asli Papua baik dengan suku lain maupun dengan para pendatang. Menurut UU badan tersebut dalam waktu maksimal satu tahun sejak berlakunya UU harus sudah terbentuk dan menjalankan tugas, namun pembentukannya baru terlaksana pada November 2005. Melalui PP No. 54/2004 mengenai kewenangan MRP yang terbatas sehingga hanya bisa menampung aspirasi serta memfasilitasi aspirasi tersebut untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk dilaporkan ke pemerintah pusat. MRP tidak punya kewenangan untuk mengatur proses pembangunan di Papua agar masyarakat Papua dapat menikmati keadilan, seperti dalam aspirasi mengenai pemekaran Papua serta masalah Freeport (Sugandi, 2008, p. 9).

Pemerintah Papua punya kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan sebagai bagian dari Otsus, hal ini banyak berkaitan dengan alam terbuka, masyarakat asli, konservasi SDA yang ada di Papua. Sasaran utamanya adalah masyarakat adat Papua yang merupakan masyarakat asli, mereka selama ini belum diberi kesempatan dalam usaha pengembangan di Papua. Kelompok masyarakat adat yang melawan kebijakan pemerintah seringkali dicap sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka). Seiring dengan kebutuhan untuk menampung kebutuhan dan aspirasi di Papua maka dibutuhkan badan yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan.

### *Penegasan Sikap PKB pada Kerusuhan Papua Agustus 2019*

Kasus pengepungan oleh massa ormas kepada mahasiswa asal Papua di asrama Papua di Surabaya, dipicu karena adanya pembakaran bendera merah putih oleh mahasiswa Papua. Dalam peristiwa tersebut kegiatan yang dilakukan dinilai bersifat rasis, diskriminatif, dan intimidatif. Bahkan ada indikasi ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran pada saat peristiwa pengepungan terjadi. Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta polisi untuk menindak tegas para pelaku dalam peristiwa tersebut, karena menyangkut jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua, terjadi diskriminatif sehingga tidak cukup penyelesaiannya hanya melalui minta maaf saja. Pengepungan tersebut menjadi pemicu kerusuhan yang lebih besar di beberapa titik di Papua yang mengakibatkan pembakaran kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum.

Peristiwa yang terjadi di Surabaya, menimbulkan gelombang protes yang menyebabkan kerusuhan di berbagai tempat. Kerusuhan di Manokwari, Propinsi Papua Barat berawal dari unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan orang yang mengakibatkan terbakarnya gedung DPRD setempat pada tanggal 19 Agustus 2019. Unjuk rasa juga mengakibatkan petugas polisi terluka serta fasilitas umum dan property pribadi terbakar. Para pengunjung rasa ada yang membawa bendera ke-3 yang digunakan oleh Gerakan Papua Merdeka dan sebagian dari mereka meneriakkan slogan pro kemerdekaan. Kerusuhan tidak hanya menyebabkan masyarakat menjadi ketakutan, namun juga lumpuhnya perekonomian setempat. Dampak selanjutnya adalah dikerahkannya tentara di Manokwari untuk mengamankan lokasi.

Unjuk rasa juga terjadi di beberapa daerah lainnya seperti di Jayapura serta Sorong. Pengunjuk rasa memblokir jalan arah menuju Bandara Sentani juga menurunkan bendera merah putih di depan kantor gubernur. Sedangkan di Sorong beberapa pengunjung rasa menggunakan pakaian monyet sebagai tanggapan terhadap cercaan “monyet” di Surabaya. Bandara Domine Eduard Osok menjadi sasaran amuk dari massa dan bagian erminal mengalami kerusakan, bahkan penjara kota juga menjadi salah satu sasaran yang dibakar sehingga mengakibatkan 258 narapidana melarikan diri (“*Hunt for 250 inmates in Papua Prison break,*” 2019). Aksi protes juga terjadi di beberapa titik yang lain, seperti di Timika, Fak fak, Merauke, Nabire, Yahukimo, dan Biak. Unjuk rasa juga dilakukan oleh para mahasiswa Papua di berbagai kota seperti di Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung yang memprotes aksi rasisme terhadap peristiwa di Surabaya.

PKB menegaskan sikap mengenai kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Sorong, serta beberapa tempat di Papua untuk segera diselesaikan. PKB menghimbau agar jangan sampai terjadi tindakan rasis, anarkis baik dengan oknum aparat ataupun oknum ormas. Tindakan ini diambil sebagai wujud rasa kepedulian PKB terhadap orang Papua, karena masyarakat Papua bukanlah orang

lain namun juga saudara (Antares, 2019). PKB sebagai salah satu parpol Islam berpegang teguh pada visinya yang akan mewujudkan keutuhan NKRI.

Maman Imanulhaq salah satu politisi PKB menyatakan harapan tidak lagi terjadi perdebatan, maupun masalah yang bisa menimbulkan terjadinya penyerangan kembali. PKB telah didatangi perwakilan dari masyarakat Papua dan telah memfasilitasi usaha meredakan konflik melalui DPC yang ada di Papua yaitu dengan meminta DPC yang ada di Manokwari serta Merauke untuk mengobarkan semangat persaudaraan dan mengajak masyarakat Papua untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan kerusuhan. PKB juga mendorong Presiden Jokowi untuk berusaha menyelesaikan konflik, sehingga aktivitas masyarakat dan ekonomi bisa berjalan dengan lancar.

Politisi PKB lainnya merespon kerusuhan yang terjadi di Wamena dan kota lainnya di Papua tahun 2019, yaitu Abdul Kadir Karding juga menghimbau agar semua warga masyarakat untuk menjaga diri, hati hati dalam bertindak dan tidak mudah mengeluarkan pernyataan yang bisa menyulut emosi dan berdampak pada perpecahan (Rakhmatulloh, 2019). Masyarakat diminta waspada menanggapi berita yang tersiar di media sosial karena tidak semua berita adalah benar. Karding juga menghimbau agar berbagai pimpinan komunitas baik formal maupun non formal yang ada di Indonesia untuk menjaga ketentraman dan waspada terhadap isu sensitif yang muncul di lingkungan sekitar.

Yaqut Cholil yang bertugas sebagai Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB menjelaskan bahwa tugas pemerintah di wilayah Papua untuk meredam konflik yang muncul bukan dalam rangka melakukan tindakan yang represif kepada masyarakat Papua. Sebagai ketua umum Pemuda Ansor, juga memberikan beberapa saran penyelesaian konflik Papua (Ayubbi, 2019), diantaranya yaitu: 1) pemerintah lebih pro aktif dengan cara mengintensifkan komunikasi kepada semua pihak, terutama warga Papua secara langsung, tidak hanya kepada tokoh masyarakat maupun tokoh adat. 2) Pemerintah mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua dengan hati, tanpa penggunaan kekerasan pada masyarakat. 3) dialog antara Jakarta dan Papua juga dinilai sangat penting agar bisa memberikan ruang sebesar-besarnya bagi para tokoh Papua terkait rumusan pembangunan di wilayah tersebut agar tidak didominasi persepsi dari Jakarta saja. 4) pemerintah segera mengambil tindakan tegas yang telah dilakukan pihak-pihak yang memicu insiden pelajar Papua di Surabaya, termasuk memberikan sanksi hukum terhadap oknum aparat yang diduga melakukan tindakan rasisme.

## **Kesimpulan**

Budaya multikultural di Indonesia menjadi satu point penting dalam menjalankan kehidupan demokrasi. Multikulturalisme harus tetap terjaga, dan yang punya peranan adalah partai politik karena punya fungsi sebagai komunikator antara masyarakat yang majemuk dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Partai politik terutama partai politik islam memiliki tantangan yang berat dalam menjaga masyarakat multikultural di Indonesia. Tantangan parpol islam cukup berat karena beragamnya corak dan ideologi dari masing masing parpol sehingga mempengaruhi pola kehidupan politik di Indonesia. Parpol Islam harus bisa menjaga dan mendorong toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah banyaknya keragaman yang

dimiliki Indonesia. PKB sebagai salah satu parpol islam telah mengedepankan penegakan pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Hal ini perlu ditumbuhkan terhadap parpol Islam yang lain. PKB bisa menjadi inisiator bagi partai Islam lain untuk menjadi garda terdepan menjaga multikulturalisme di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Antares, R. (2019). Jangan sampai ada tindakan anarkis, rasis, baik oknum aparat atau oknum ormas. *Tagar.id*. Retrieved from <https://www.tagar.id/pernyataan-sikap-pkb-mengenai-rasis-papua>
- Ayubbi, S. Al. (2019). Ini Solusi PKB atasi Konflik di Papua & Papua Barat. *Bisnis.com*. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20190831/16/1143042/ini-solusi-pkb-atasi-konflik-di-papua-papua-barat>
- Azizah, L., & Azhar, P. (2015). Islam di Tengah Masyarakat Multikultural Indonesia. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 7(1).
- Hunt for 250 inmates in Papua Prison break. (2019). *BBC (online)*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-49417311>
- Kompas.com. (2018, February 20). Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa. *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>
- Mayrudin, Y. M., & Akbar, M. C. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi Tentang PAN, PKB, dan PKS. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2).
- Menjawab Tantangan Multukulturalisme di Indonesia. (2014). *Republika*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/14/12/05/ng3i0g18-iqra-menjawab-tantangan-multikultural-di-indonesia>
- Muktamar PKB Hasilkan Deklarasi Bali Dukung Islam Nusantara. (2019). *Cnnindonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190821222728-32-423579/muktamar-pkb-hasilkan-deklarasi-bali-dukung-islam-nusantara>
- Rakhmatulloh. (2019, September 24). Kerusuhan di Wamena, PKB Minta Semua Pihak Tidak Mudah Terpancing. *Sindo News*. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/1442546/14/kerusuhan-di-wamena-pkb-minta-semua-pihak-tidak-mudah-terpancing-1569291037>
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Sumbullah, U. (2010). *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syihab, A. (1997). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Utaria, S. (2008). *Tipologi Politik Partai Islam di Indonesia Kontestan Pemilu 2004* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Retrieved from [http://digilib.uin-suka.ac.id/2731/1/BAB I%20 V%20](http://digilib.uin-suka.ac.id/2731/1/BAB%20I%20V%20)

DAFTAR PUSTAKA.pdf

Visi Misi PKB. (n.d.). Retrieved from <https://pkb.id/page/visi-misi/>

Yaqin, A. (2005). *Pendidikan Multikultural Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.